



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA PERGURUAN TINGGI KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA
DAN OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	: II
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Universitas Indonesia 2. Universitas Brawijaya 3. Institut Teknologi Bandung 4. Universitas Terbuka 5. Universitas Gadjah Mada
Hari/Tanggal	: Senin, 21 November 2022
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di luar kampus utama; 2. Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri; 3. Masukan dan rekomendasi untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Hadir Komisi X DPR RI	: 23 orang dari 28 orang Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Prof. ARI KUNCORO (Universitas Indonesia) 2. Prof. ABDUL HARIS 3. drg. NURTAMI, Ph.D. 4. DENTI IRTIYANI 5. ISMIYANAH 6. Prof. Dr. drh. AULANNI'AM, DES (Universitas Brawijaya) 7. Dr. SUJARWO, SP., MP. 8. HERI PRAWOTO WIDODO, S.Sos., MAB

9. **Ir. MUHAMMAD ABDUH, Ph.D (Institut Teknologi Bandung)**
10. Dr. ANDI CAKRAVASTIA, S.T., M.T.,
11. **Dr. MOHAMAD YUNUS, S.S., M.A. (Universitas Terbuka)**
12. MAYA MARIA
13. **Prof. Dr. WENING UDASMORO, S.S., M.Hum., DEA. (Universitas Gadjah Mada)**
14. WIRASTUTI WIDYATMANTI, S.Si., Ph.D

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari **Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Terbuka dan Universitas Gadjah Mada**, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

- A. Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Perguruan Tinggi (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:
 1. Universitas Indonesia menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Tantangan Kompetisi Global dalam peningkatan Ranking Universitas Dunia (WUR) membutuhkan strategi dan komitmen anggaran yang serius, meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas program studi,
 - 2) Peningkatan kualitas riset dan kolaborasi internasional,
 - 3) Dosen di PTN dituntut untuk melakukan tridharma, sementara seharusnya tugas tridharma merupakan tugas institusi sehingga Dosen di PTN dapat berfokus di salah satu kegiatan sesuai kemampuan dan kapasitasnya.
 - b. Merekomendasikan beberapa hal diantaranya:
 - 1) Otonomi PT yang lebih fleksibel baik secara akademik maupun dalam pengelolaan keuangan dan asetnya.
 - 2) Untuk bersaing secara global perlu mendorong beberapa PTN terbaik (3 terbaik) melalui pendanaan khusus dengan indikator kinerja tersendiri;

- 3) Penyelenggaraan PSDKU dan Prodi PJJ melibatkan PT lokal sebagai mitra dan pusat belajarnya.
2. Universitas Brawijaya menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Implementasi IT dalam penguatan *strategic decision making* terus dioptimalkan efektivitas, produktivitasnya, dan menjangkau space yang lebih luas dalam operasi akademik dan non akademiknya;
 - b. Universitas Brawijaya berpeluang besar meningkatkan kinerja investasi akademik dan non-akademiknya;
 - c. Kesadaran akan Budaya Mutu dikuatkan, indikator dalam Ranking adalah untuk evaluasi internal, penguatan kemanfaatan UB bagi pengembangan SDM berkualitas dan pembangunan di masyarakat harus menjadi concern utama diupayakan;
 - d. PDDIKTI telah menjalankan fungsi sangat baik dalam deteksi dini penurunan performa program studi dan terus ditingkatkan system informasi sehingga kesadaran akan kualitas Designed by Information System yang terdesiminasi;
 - e. Rekognisi pengabdian masyarakat harus dirumuskan dengan lebih seksama dan mendapat porsi lebih baik sehingga eksistensi Perguruan Tinggi adalah bagian dari solusi langsung permasalahan real di masyarakat
 - f. Pemerintah terus menciptakan suasana kondusif bagi Perguruan tinggi untuk berkolaborasi membangun bangsa – Peningkatan *grant research* dan pengabdian bersifat konsorsium (lintas universitas);
 - g. Pemerintah terus mendorong kesadaran akan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi
 - h. PSDKU masih bersifat komplemen bagi pengembangan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi.
3. Institut Teknologi Bandung menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Terkait Kebijakan Multikampus, ITB menjamin layanan dan kualitas akademik yang sama di seluruh kampus ITB, Program studi di Kampus Ganesha dan Cirebon memiliki kurikulum, materi, metoda pengajaran, dan evaluasi wajib sama;
 - b. Kebijakan akademik dan kemahasiswaan terpusat untuk seluruh kampus ITB, Layanan Akademik dan Kemahasiswaan dikelola masing-masing Direktorat Kampus, dan Pengelolaan teknis dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat Kampus;
 - c. Pemerintah perlu menegaskan bahwa pemberian status badan hukum hanya kepada sejumlah PTN yang memenuhi syarat untuk menjadi PTNBH;
 - d. RUU Sisdiknas, perlu diperkaya substansi pengaturannya dengan berbagai ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan;

- e. Menjadikan Kementerian Dikbudristek sebagai satu-satunya wakil pemerintah yang dapat menerbitkan izin bagi institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia;
 - f. Perlunya merumuskan ketentuan yang lebih baik agar semangat Kampus Merdeka tidak mengarah pada liberalisasi Pendidikan.
4. Universitas Terbuka menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Saat ini UT bukan lagi satu-satunya perguruan tinggi yang menerapkan system PJJ. Terdapat sejumlah perguruan tinggi lain yang juga telah memperoleh izin penyelenggaraan PJJ. Pemahaman tentang PJJ atau PTTJJ sangat beragam, dan tidak sedikit yang menimbulkan kesalahpahaman. Untuk itu:
 - 1) Seperti halnya dalam UU Sisdiknas tahun 2003, keberadaan PJJ pun perlu diwadahi secara eksplisit dalam draft UU Sisdiknas yang baru;
 - 2) Standar dan ketentuan penyelenggaraan PJJ perlu diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - 3) Dalam tataran praktis, termasuk instrumen BAN PT, karakteristik PJJ acap terlewatkan;
 - 4) Dalam rangka peningkatan APK Pendidikan Tinggi atau bahkan wajib belajar hingga level SMA, keberadaan PJJ menjadi instrumen penting dan strategis bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut;
 - b. Perlu bantuan pemerintah, agar eksistensi UT dapat dipahami oleh semua pihak dengan baik dan proporsional;
 - c. Setiap perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang khas, sesuai dengan kekuatan dan arah capaiannya.
5. Universitas Gadjah Mada menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan 2 program studi UGM di Jakarta dilakukan dengan prinsip akuntabilitas publik dengan mutu setara dengan program studi yang sama di UGM Yogyakarta;
 - b. Masyarakat Indonesia memiliki diversitas: Kelas sosial, etnisitas, gender dsb. Tidak semuanya memiliki kesempatan mengakses digital, sehingga perlu penguatan akses dan pemikiran bagi mereka yang memang betul-betul marjinal dalam akses dunia digital;
 - c. Perlu keseimbangan dengan program yang non digital untuk PT, misalnya bagaimana melihat aspek Kesehatan mahasiswa (Fisik, mental, sosial dan sebagainya);
 - d. Dukungan sistem bagaimana mengkoneksikan PT yang besar dalam networking dan kerja bersama.

- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendorong Kemendikbudristek RI dan para Perguruan Tinggi, agar dalam penyelenggaraan Pendidikan di Luar Kampus Utama untuk memperhatikan kerjasama dengan Perguruan Tinggi daerah, terutama PTS setempat, sehingga terjadi sinergi dalam peningkatan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi;
 2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk membuat peraturan yang jelas mengenai kampus-kampus luar negeri yang masuk ke Indonesia, melalui kerjasama dengan pemerintah maupun institusi-institusi Pendidikan setempat;
 3. Mendorong Kemendikbudristek RI membuat pola reward berbasis output yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi skala nasional dan internasional;
 4. Memperkuat kolaborasi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing diantara para Perguruan Tinggi besar;
 5. Mendorong beasiswa bagi kampus-kampus PSDKU melalui beasiswa pemerintah dan berbagai program beasiswa hasil ikhtiar kampus tersebut;
 6. Mendorong kampus-kampus untuk mengakses diaspora Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari jaringan untuk peningkatan mutu kampus Indonesia;
 7. Meminta para narasumber tetap aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan Kebijakan Perguruan Tinggi dengan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan Pendidikan.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.17 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol

